

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem hukum di dunia. ¹²Disiplin ini tidak hanya mempelajari teks hukum, tetapi juga konteks sosial, budaya, sejarah, dan politik yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum dalam suatu masyarakat.

Perbandingan hukum melibatkan metode dan teknik yang sistematis untuk membandingkan institusi hukum, norma, dan praktik di berbagai negara. Dengan demikian, perbandingan hukum berfungsi sebagai alat penting untuk berbagai tujuan akademis dan praktis, seperti memahami evolusi hukum, mengidentifikasi tren global, serta mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum nasional.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perbandingan hukum:

a. Tujuan Perbandingan Hukum:

- 1) **Akademis:** Memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari berbagai sistem hukum dan bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya mereka.
- 2) **Praktis:** Membantu dalam proses harmonisasi dan unifikasi hukum, terutama dalam konteks globalisasi dan integrasi regional seperti Uni Eropa.
- 3) **Reformasi Hukum:** Memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dari berbagai negara dapat diadaptasi atau diadopsi untuk memperbaiki sistem hukum nasional.
- 4) **Internasionalisasi Hukum:** Memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dalam perdagangan internasional, arbitrase, dan kerja sama lintas batas.

¹² Zweigert, Konrad, dan Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. 3rd ed. Oxford University Press, 1998.

2. Tujuan Perbandingan Hukum Keselamatan Penerbangan

Keselamatan penerbangan adalah aspek kritis dari industri penerbangan yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai yurisdiksi¹³. Perbandingan hukum dalam keselamatan penerbangan memiliki tujuan yang spesifik:

a. Meningkatkan Standar Keselamatan Global:

Dengan membandingkan regulasi keselamatan penerbangan di berbagai negara, otoritas penerbangan dapat meningkatkan standar keselamatan global. Ini termasuk mengadopsi praktik terbaik yang terbukti efektif dalam mengurangi insiden dan kecelakaan penerbangan.

b. Mengidentifikasi Kesenjangan dan Kelemahan:

Perbandingan hukum memungkinkan identifikasi kesenjangan dan kelemahan dalam regulasi keselamatan penerbangan di berbagai negara.¹⁴ Dengan demikian, otoritas dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi kekurangan ini dan meningkatkan keselamatan operasional.

c. Mendorong Keselarasan Regulasi:

Dalam industri yang sangat terintegrasi seperti penerbangan, keselarasan regulasi antara negara sangat penting. Perbandingan hukum membantu dalam menyelaraskan peraturan dan prosedur keselamatan untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang tinggi dipertahankan di seluruh dunia.

d. Memfasilitasi Kerjasama Internasional:

Perbandingan hukum keselamatan penerbangan mendorong kerjasama internasional dalam investigasi kecelakaan, pertukaran informasi, dan pelatihan personel penerbangan. Ini penting untuk mengembangkan respons kolektif terhadap tantangan keselamatan penerbangan.

¹³ International Civil Aviation Organization (ICAO). (2020). Safety Management Manual (Doc 9859). ICAO.

¹⁴ Bogsch, I. L. (2016). Comparative Legal Systems in Aviation Law. *Journal of Air Law and Commerce*, 81(4), 595–626. Insiden Batik Air Penerbangan ID-6548 (25 Januari 2024): Pilot dan kopilot tertidur selama 28 menit dalam penerbangan

e. Meningkatkan Efisiensi Operasional:

Dengan memahami bagaimana negara lain mengelola keselamatan penerbangan, otoritas penerbangan dapat mengadopsi prosedur yang lebih efisien dan efektif. Ini tidak hanya meningkatkan keselamatan tetapi juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keandalan penerbangan.

f. Menjamin Perlindungan Penumpang

Pada akhirnya, tujuan utama dari perbandingan hukum keselamatan penerbangan adalah untuk memastikan bahwa penumpang terlindungi dari risiko yang tidak perlu. Ini melibatkan penerapan regulasi yang komprehensif dan konsisten yang menjamin keselamatan dan keamanan penumpang di seluruh dunia.

B. Tinjauan umum tentang Penerbangan

a. Pengertian Penerbangan

Penerbangan merupakan kegiatan transportasi udara yang melibatkan penggunaan pesawat terbang untuk mengangkut penumpang, barang, atau menjalankan operasi tertentu, seperti misi penyelamatan atau survei. Lebih dari sekadar alat transportasi, penerbangan adalah sistem kompleks yang mencakup infrastruktur bandara, kontrol lalu lintas udara, manajemen maskapai, dan regulasi internasional yang menjamin keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan. Sistem ini didukung oleh teknologi canggih, tenaga kerja yang terampil, dan peraturan yang ketat untuk memastikan efisiensi dan keselamatan operasional.

Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam industri ini, yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan serta insiden yang membahayakan penumpang, kru, dan masyarakat luas. Berbagai langkah diambil untuk menjamin keselamatan, termasuk manajemen risiko melalui identifikasi dan mitigasi bahaya, pelatihan berkala bagi seluruh personel, inspeksi dan pemeliharaan pesawat yang ketat, serta pengelolaan waktu kerja dan istirahat untuk mencegah kelelahan kru. Semua ini menjadi

landasan penting bagi penerbangan agar dapat beroperasi dengan standar yang tinggi.

Dalam memastikan keselamatan tersebut, regulasi memainkan peran penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, penerbangan sipil diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,¹⁵ diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta Peraturan Menteri Perhubungan. Aturan ini mengatur standar operasional, kualifikasi personel, dan pengawasan terhadap maskapai serta operator bandara. Sementara itu, di tingkat internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menetapkan standar dan rekomendasi praktik (SARPs) yang menjadi acuan bagi negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengharmonisasikan regulasi nasional mereka.¹⁶

Di Amerika Serikat, regulasi penerbangan sipil diatur oleh Federal Aviation Administration (FAA) melalui Federal Aviation Regulations (FARs), yang mencakup berbagai aspek, seperti manajemen kelelahan pilot, inspeksi pesawat, dan prosedur keselamatan operasional. Dengan adanya harmonisasi regulasi ini, penerbangan dapat terus memberikan layanan yang andal dan aman, memprioritaskan keselamatan tanpa mengorbankan efisiensi..

b. Regulasi Penerbangan

Regulasi penerbangan bertujuan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi dalam operasi penerbangan. Aturan-aturan ini diterapkan oleh badan pengatur di berbagai negara yang berfungsi untuk mengembangkan dan menegakkan standar yang harus dipatuhi oleh maskapai penerbangan, pilot, dan personel penerbangan lainnya.

Keselamatan penerbangan mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan nyawa dan kesehatan penumpang serta awak pesawat. Badan pengatur mengembangkan prosedur operasional yang ketat untuk mencegah

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

¹⁶ ICAO. (2018). Annexes to the Convention on International Civil Aviation. ICAO.

kecelakaan dan insiden, memastikan semua operasi penerbangan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Selain itu, keselamatan operasional juga mencakup pemeliharaan pesawat, pelatihan dan sertifikasi pilot, serta prosedur manajemen lalu lintas udara.

Keamanan penerbangan melibatkan antisipasi dan pencegahan terhadap ancaman seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya terhadap pesawat dan fasilitas penerbangan. Ini mencakup langkah-langkah keamanan di bandara, pemeriksaan keamanan sebelum penerbangan, serta koordinasi dengan badan keamanan nasional dan internasional untuk mengatasi potensi ancaman. Badan pengatur juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bandara memiliki prosedur keamanan yang efektif untuk melindungi penumpang, personel, dan aset.

Efisiensi dalam operasi penerbangan adalah aspek penting lainnya dari regulasi penerbangan. Efisiensi operasional mengacu pada optimalisasi operasi penerbangan untuk mengurangi keterlambatan, meningkatkan penggunaan sumber daya, dan memastikan jadwal penerbangan yang tepat waktu. Ini juga mencakup pengaturan ruang udara dan manajemen lalu lintas udara untuk menghindari kemacetan dan meningkatkan aliran penerbangan. Efisiensi ekonomi mencakup upaya untuk memastikan bahwa industri penerbangan beroperasi dengan biaya yang efektif, memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan penerbangan dan konsumen.

Badan pengatur seperti International Civil Aviation Organization (ICAO) berperan dalam menetapkan standar internasional untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. ICAO menerbitkan berbagai dokumen yang mencakup aspek-aspek penting penerbangan seperti operasional pesawat, keselamatan, navigasi udara, dan keamanan. Di tingkat nasional, badan pengatur seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur penerbangan sipil di dalam negeri. Mereka mengeluarkan berbagai peraturan dan keputusan yang mengatur aspek operasional, keselamatan, dan keamanan penerbangan sipil.

Regulasi penerbangan juga mencakup prosedur untuk penanganan insiden dan kecelakaan. Badan pengatur menetapkan prosedur investigasi dan pelaporan insiden penerbangan untuk memahami penyebabnya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Ini mencakup analisis data penerbangan, pemeriksaan teknis pesawat, dan penilaian terhadap kinerja awak pesawat dan personel lainnya.

Secara keseluruhan, regulasi penerbangan dirancang untuk menciptakan sistem penerbangan yang aman, andal, dan efisien. Dengan mematuhi standar yang ditetapkan oleh badan pengatur, maskapai penerbangan dan personel penerbangan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang ketat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan penumpang.

C. Tinjauan umum tentang regulasi

Regulasi penerbangan adalah seperangkat aturan dan standar yang diterapkan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi dalam operasi penerbangan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari desain dan pemeliharaan pesawat, pelatihan dan sertifikasi personel penerbangan, hingga pengelolaan lalu lintas udara dan penanganan insiden. Badan pengatur di setiap negara bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan menegakkan aturan-aturan ini, yang sering kali juga didasarkan pada standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi global seperti International Civil Aviation Organization (ICAO). Tujuan utama dari regulasi penerbangan adalah untuk melindungi penumpang, awak pesawat, dan masyarakat umum dari potensi bahaya yang terkait dengan operasional penerbangan.

1. Regulasi Penerbangan di Indonesia

Regulasi penerbangan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Beberapa peraturan utama yang mengatur sektor ini meliputi:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan dasar hukum untuk seluruh aspek penerbangan sipil di

Indonesia, termasuk keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan. Pasal 54 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pilot harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang dan operasi penerbangan. Pasal 76 mengatur kewajiban perusahaan penerbangan untuk memastikan pilot tidak mengalami kelelahan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan mengatur berbagai aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk persyaratan untuk personel penerbangan. Pasal 67 menyatakan bahwa setiap personel penerbangan harus mematuhi batas waktu kerja dan istirahat untuk menjaga kondisi fisik dan mental yang prima.¹⁷

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Kualifikasi dan Kewajiban Personel Penerbangan mengatur kualifikasi, pelatihan, dan kewajiban personel penerbangan termasuk pilot. Pasal 33 menyatakan bahwa pilot harus mendapatkan istirahat yang cukup sebelum melakukan penerbangan, dan perusahaan penerbangan harus mengatur jadwal kerja yang memadai untuk memastikan hal ini.

Badan pengatur utama di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah Kementerian Perhubungan, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengawasi, dan menegakkan regulasi penerbangan di seluruh Indonesia.

2. Regulasi Penerbangan di Amerika Serikat

Regulasi penerbangan di Amerika Serikat diatur oleh Federal Aviation Administration (FAA, Administrasi Penerbangan Federal), sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan sipil. FAA memiliki peran sentral dalam menetapkan dan menegakkan standar operasional penerbangan, memastikan bahwa industri ini beroperasi sesuai dengan prinsip keselamatan, keamanan, dan efisiensi. Beberapa

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, Pasal 67.

peraturan utama yang mengatur sektor penerbangan di Amerika Serikat adalah Federal Aviation Regulations (FAR, Peraturan Penerbangan Federal), Aviation and Transportation Security Act (ATSA, Undang-Undang Keamanan Penerbangan dan Transportasi), dan Pilot Records Improvement Act (PRIA, Undang-Undang Peningkatan Rekam Jejak Pilot). FAR mencakup semua aspek penerbangan sipil dan memiliki bagian penting seperti Part 117, yang mengatur batas waktu kerja dan istirahat pilot untuk mencegah kelelahan. Dalam hal ini, Section 117.5 mengharuskan maskapai untuk memiliki sistem manajemen risiko kelelahan, sementara Section 117.25 menetapkan waktu istirahat minimum 10 jam, termasuk 8 jam tidur tanpa gangguan sebelum tugas penerbangan. Selain itu, Part 121 mengatur persyaratan operasional untuk penerbangan domestik, flag, dan operasi tambahan, mencakup batas waktu terbang dan periode istirahat wajib bagi kru penerbangan.

ATSA, yang disahkan setelah peristiwa 11 September 2001, memperkuat berbagai aspek keamanan penerbangan, memastikan bahwa pilot dan personel lainnya memiliki akses yang aman ke sistem penerbangan. PRIA juga memainkan peran penting dengan mengharuskan maskapai untuk memeriksa rekam jejak penerbangan dan pelatihan pilot sebelum mempekerjakan mereka, meningkatkan akuntabilitas dan kualitas personel penerbangan.

FAA tidak hanya menetapkan regulasi tetapi juga mengawasi dan menegakkan kepatuhan melalui program audit, inspeksi, dan penegakan hukum. Dalam prosesnya, FAA berkolaborasi dengan International Civil Aviation Organization (ICAO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) untuk memastikan bahwa regulasi Amerika Serikat sejalan dengan standar internasional. Hal ini menjadikan regulasi FAA sebagai salah satu yang paling ketat dan terperinci di dunia, menciptakan benchmark yang diakui secara global dalam penerapan keselamatan penerbangan.

Membandingkan regulasi penerbangan Indonesia dengan Amerika Serikat sangat relevan karena keduanya menghadapi tantangan serupa dalam mengelola kelelahan pilot, keamanan penerbangan, dan kepatuhan terhadap standar internasional. FAA telah lama diakui sebagai pelopor dalam keselamatan penerbangan, memberikan contoh praktik terbaik yang dapat diadaptasi oleh negara lain. Dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan antara regulasi kedua negara, Indonesia dapat mengidentifikasi area untuk peningkatan tanpa merendahkan sistem yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik penerbangan Indonesia.

Berikut adalah beberapa insiden penerbangan yang melibatkan pilot tertidur saat bertugas di Amerika Serikat dan Indonesia:

1. Amerika Serikat:

- a. Colgan Air Penerbangan 3407 (2009): Kecelakaan fatal di Buffalo, New York, yang menewaskan 50 orang. Investigasi mengungkapkan bahwa kelelahan pilot berkontribusi pada kesalahan yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
- b. Insiden JetBlue (2012): Seorang pilot JetBlue tertidur selama penerbangan dari New York ke Las Vegas. Kopilot mengambil alih kendali, dan penerbangan mendarat dengan selamat.

2. Indonesia:

- a. Batik Air Penerbangan ID-6548 (25 Januari 2024):** Pilot dan kopilot tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari ke Jakarta, menyebabkan pesawat keluar dari jalur dan tidak merespons panggilan pengendali lalu lintas udara. Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat, dan insiden ini diklasifikasikan sebagai “serius” oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
- b. Lion Air Penerbangan JT-797 (2013): Pilot tertidur selama penerbangan dari Surabaya ke Jakarta, menyebabkan pesawat turun di bawah ketinggian yang ditetapkan. Kopilot membangunkan pilot, dan pesawat kembali ke ketinggian yang benar tanpa insiden lebih lanjut.

Insiden-insiden ini menyoroti pentingnya manajemen kelelahan dalam industri penerbangan dan perlunya regulasi yang ketat untuk memastikan keselamatan penerbangan.

Membandingkan regulasi penerbangan Indonesia dengan Amerika Serikat sangat penting karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan industri penerbangan yang sangat maju dan memiliki sistem keselamatan penerbangan yang terbukti efektif dalam mengurangi insiden yang terkait dengan kelelahan pilot.¹⁸ Amerika Serikat telah lama menjadi pionir dalam pengembangan regulasi yang mengatur jam kerja dan istirahat pilot, serta memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat yang dikelola oleh Federal Aviation Administration (FAA).

Beberapa alasan mengapa regulasi penerbangan Amerika Serikat perlu dibandingkan dengan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar yang Teruji: Amerika Serikat telah mengimplementasikan Federal Aviation Regulations (FAR) yang menyeluruh dan teruji untuk mengatasi masalah kelelahan pilot, termasuk ketentuan tentang waktu istirahat yang cukup bagi pilot untuk mencegah tidur saat penerbangan. Salah satu regulasi penting dalam FAR Part 117 mengatur durasi waktu istirahat, seperti ketentuan yang mengharuskan pilot memiliki waktu istirahat minimal 10 jam, termasuk 8 jam tidur tanpa gangguan sebelum memulai tugas penerbangan. Regulasinya yang ketat ini telah terbukti efektif dalam mengurangi kecelakaan terkait kelelahan pilot, seperti pada insiden Colgan Air Penerbangan 3407 pada 2009, yang menyebabkan 50 orang meninggal dunia. Kejadian tersebut, yang disebabkan oleh kelelahan pilot, memicu perubahan besar dalam regulasi istirahat pilot di AS.
2. Penanganan Kelelahan Pilot: Amerika Serikat sudah sejak lama mengakui dampak buruk dari kelelahan terhadap keselamatan penerbangan dan mengambil langkah proaktif melalui peraturan yang ketat. Pada 2011, setelah insiden Colgan Air, AS memperbarui regulasi untuk memastikan pilot mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan aman. Keberhasilan

¹⁸ International Air Transport Association (IATA). (2022). Annual Aviation Safety Report.

regulasi ini dalam mengurangi insiden serupa menjadi relevan untuk diterapkan di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kasus serupa, seperti kejadian pilot Batik Air yang tertidur pada 25 Januari 2024. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keselamatan penerbangan dan mendorong Indonesia untuk mengevaluasi kembali peraturan yang ada.

- c. Pengawasan yang Ketat dan Penegakan Hukum: Sistem pengawasan yang diterapkan oleh FAA sangat disiplin, dengan audit dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan. Hal ini menjadi acuan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait peraturan penerbangan. Di Amerika Serikat, selain pengawasan reguler oleh FAA, ada juga audit independen dan investigasi mendalam terhadap insiden penerbangan, yang tidak hanya mencakup kecelakaan tetapi juga potensi pelanggaran lainnya, termasuk kelelahan pilot. Di Indonesia, meskipun terdapat peraturan terkait keselamatan penerbangan, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan regulasi ini perlu diperkuat, terutama dalam kasus-kasus seperti yang terjadi pada Batik Air.
- d. Pengalaman dengan Insiden: Amerika Serikat telah memiliki pengalaman dalam menangani insiden terkait tidur pilot dan kelelahan¹⁹, seperti yang terjadi pada Colgan Air Penerbangan 3407 (2009), yang disebabkan oleh kelelahan pilot dan memicu kebijakan baru dalam regulasi waktu istirahat pilot. Kasus ini mengakibatkan perubahan besar dalam kebijakan penerbangan di AS, seperti implementasi regulasi waktu istirahat yang lebih ketat dan program manajemen kelelahan. Insiden serupa di Indonesia, seperti pada penerbangan Batik Air pada 25 Januari 2024, menyoroti adanya masalah serupa yang belum sepenuhnya diatur secara rinci dalam regulasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memodifikasi dan memperketat regulasi keselamatan penerbangan

¹⁹ National Transportation Safety Board (NTSB). (2010). Safety Recommendations on Pilot Fatigue and Rest Requirements.

berdasarkan pelajaran yang diambil dari pengalaman dan peraturan yang diterapkan di Amerika Serikat.

- e. Harmonisasi dengan Standar Internasional: Amerika Serikat bekerja erat dengan organisasi penerbangan internasional seperti International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan standar internasional. Dalam hal ini, membandingkan regulasi Indonesia dengan yang ada di Amerika Serikat dapat membantu Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan penerbangannya agar lebih harmonis dengan standar global yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di seluruh dunia.

Dengan mempertimbangkan data insiden dan regulasi yang ada, terlihat jelas bahwa Amerika Serikat memiliki sistem regulasi dan pengawasan yang lebih matang dalam mengatasi masalah kelelahan pilot. Kasus-kasus insiden seperti Colgan Air Penerbangan 3407 dan peraturan yang diterapkan setelahnya menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang ketat dalam menangani kelelahan pilot. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait implementasi regulasi yang lebih jelas mengenai tidur pilot selama penerbangan, seperti yang terlihat dalam insiden Batik Air pada 25 Januari 2024.²⁰ Oleh karena itu, mempelajari dan mengadopsi beberapa aspek dari regulasi penerbangan Amerika Serikat dapat membantu Indonesia meningkatkan keselamatan penerbangan dan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan pilot.

²⁰ Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (2024). Preliminary Report on Batik Air ID-6548 Incident.